



RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif dan prakiraan maju. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah gambaran visi dan misi kepala daerah yang terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi renja tahun sebelumnya.

Sebagai Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang menyusun Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- b. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022;
- c. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Secara umum, fungsi Renja Perangkat Daerah untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana bentuk pelayanan Perangkat Daerah akan dilaksanakan dan apa yang hendak dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan ; (3) langkah-langkah atau tindakan teknis apa saja yang perlu dilakukan Perangkat daerah agar program berjalan secara efektif.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2022 merupakan penjabaran lebih lanjut dari substansi yang terkandung dalam Renstra, kedalam kegiatan yang bersifat operasional dengan mempertimbangkan ketersediaan SDM, waktu dan anggaran agar dapat dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi sebagai salah satu alat ukur dalam pencapaian kinerja organisasi. Target-target yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2022 akan menjadi bahan dan evaluasi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 47);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Sampang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022, meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Inspektorat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan Kegiatan Pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku pimpinan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan Tinggi maupun dari Perangkat daerah kabupaten/ Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat Daerah Provinsi dari Penelitian Lapangan dan Pengamatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

- a.) Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- b.) Menjelaskan Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam PMDN No. 17 Tahun 2021 sesuai dengan masing-masing perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Menjelaskan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta pendanaannya);
- 4.2 Menjelaskan Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2022.

BAB V. PENUTUP

- 5.1 Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
- 5.2 Menjelaskan kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 5.3 Menjelaskan Rencana Tindak Lanjut (mencantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama dan tandatangan kepala perangkat daerah serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan).

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang sebagai lembaga yang membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan sehingga dapat mewujudkan misi ke-4 RPJMD yakni ***“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik”***

Adapun fungsi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang adalah a) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan pada perangkat daerah, desa/kelurahan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta kegiatan pengawasan lainnya, c) pelaksanaan pengawasan lain atas penugasan Bupati, d) penanganan pengaduan masyarakat dan pengawasan dengan tujuan tertentu, e) melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, f) penyusunan laporan hasil pengawasan, g) pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah Kabupaten; dan h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2021 dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra 2019-2024. Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang. Selain itu juga dapat diketahui masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya secara langsung sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2022 dan 2023. Disamping itu memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Pada tahun anggaran 2021 Anggaran Urusan Penunjang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebesar Rp10.198.982.150,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp10.018.532.076,00 dan Belanja Modal sebesar Rp180.450.074,00. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program dan 12 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel T-C.29.

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Kabupaten Sampang

Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.05.4.05.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan	100%	95%	100%	90,31%	90%	100%	285,31%	30
4.05.4.05.05.01.01	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah surat yang terkirim	2500 surat	2347 surat	2500 surat	2258 surat	90%	2500 surat	7105 surat	30
4.05.4.05.05.01.02	Penyedia Sarana Administrasi Perkantoran	Alat tulis kantor	70 jenis	70 jenis	70 jenis	70 jenis	100%	49 jenis	189 jenis	30
4.05.4.05.05.01.03	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar	128 kali	104 kali	52 kali	40 kali	77%	25 kali	169 kali	30

4.05.4.05. 05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana	100%	99%	100%	100%	100%	100%	299%	30
4.05.4.05. 05.02.01	Pembangunan /Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung	1 paket	1 paket	22 paket	22 paket	100%	1 paket	24 paket	30
4.05.4.05. 05.02.03	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	- Pengadaan kendaraan dinas operasional - Tersedianya kendaraan dinas	7 unit 24 unit	5 unit 5 unit	2 unit 5 unit	2 unit 5 unit	100% 100%	1 paket	8 unit 10 unit	30
4.05.4.05. 05.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan alat kantor	6 unit	45 buah 14 unit 15 jenis	1 paket	1 paket	100%	6 jenis	3 paket	30
4.05.4.05. 05.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Aparatur yang mengikuti kapasitas sumber daya aparatur	50,00	100%	100%	80,77%	80%	100%	280,77%	30
4.05.4.05. 05.03.01	Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar	APIP yang mengikuti diklat teknis	45 ok	45 ok	22 ok	12 ok	50%	45 ok	102 ok	30

4.05.4.05. 05.03.04	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa	Pengiriman JFA bimtek APIP	50 ok	40 ok	30 ok	30 ok	100%	30 ok	100 ok	30
4.05.4.05. 05.04	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN , PENGANGGARAN, PELAPORAN, DAN PELAYANAN INFORMASI	Persentase penyusunan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	30
304.05.4.0 5.05.04.01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Laporan kinerja dan realisasi kinerja SKPD	36 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	100%	4 dokumen	30
4.05.4.05. 05.04.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen RKA, DPA, RENJA, RPJMD, dan Renstra	42 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	7 dokumen	17 dokumen	30
4.05.4.05. 05.04.03	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Promosi Pelayanan Perangkat Daerah	6 kali	2 kali	0 kali	0 kali	100%	2 kali	4 kali	30
4.05.4.05. 05.29	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Persentase kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	100%	97%	100%	100%	100%	100%	297%	30
4.05.4.05.	Penyusunan Kebijakan	- Jumlah	3 aplikasi	- 1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	1 aplikasi	3 aplikasi	30

05.29.01	Sistem dan Prosedur Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> aplikasi sistem informasi manajemen kinerja berfungsi baik Jumlah SOP yang disusun Pemenuhan infrastruktur kapabilitas APIP Reviu berjenjang dan telaahan sejawat 	0 0 2 laporan	<ul style="list-style-type: none"> - 10 Dokumen - 100% - 470 temuan 	2 dokumen 100% 2 laporan	2 dokumen 100% 2 laporan	100% 100% 100%	2 dokumen 0 8 laporan	14 dokumen 200% 10 laporan	
4.05.4.05.05.30	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Persentase temuan audit yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%	300%	30
4.05.4.05.05.30.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah LHA kinerja - LHA operasional - LHM BOS 		<ul style="list-style-type: none"> - 41 LHA - 347 LHM 	-	<ul style="list-style-type: none"> - 3 LHA - 69 LHA - 0 LHM - 65LHM - 128 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 LHA - 51 LHA - 0 LHM 65 LHM - 49 LHM 	n/a	30

		- LHM DD - LHM Hibah - LHR yang terbit	3 LHR			LHM 20 LHR	100% 100%	7 LHR		
4.05.4.05. 05.30.05	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Temuan pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	42 OPD	42 OPD	42 OPD	100%	95%	n/a	30
4.05.4.05. 05.30.06	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Penilaian SPIP SKPD	42	10 OPD	10 OPD	10 OPD	100%	0	n/a	
4.05.4.05. 05.39	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	99%	100%	100%	100%	0	199%	
4.05.4.05. 05.39.01	Evaluasi SAKIP OPD dan LPPD	LHE SAKIP LHE LPPD	42	42 OPD	42 LHE 1 LHE	42 LHE 1 LHE	100% 100%	27 OPD	111	
4.05.4.05. 05.31.01	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	LHP kasus	90	45 LHP	65 LHP	79 LHP	120%	n/a		
4.05.4.05. 05.40	PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI	Persentase pencegahan korupsi yang berhasil dikendalikan	75,00	99%	100%	100%	100%	0	199%	

4.05.4.05. 05.40.01	Kegiatan Pencegahan dan pengendalian tindak pidana korupsi	Jumlah laporan UPG yang ditangani Jumlah OPD dengan wilayah WBK dan ZI Laporan hasil verifikasi LHKS Laporan Monev MCP	4 laporan 42 OPD 4 laporan	45 LHP	4 laporan 3 OPD 1 dokumen 4 laporan	4 laporan 3 OPD 1 dokumen 4 laporan	100% 100% 100%	4 laporan 3 OPD 1 dokumen 4 laporan	n/a	
4.05.4.05. 05.40.02	Survey penilaian integritas	Nilai Integritas	75		0	0	100%	72	n/a	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang adalah 95,89% atau dapat dikategorikan sangat baik.

Penjelasan faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebab jumlah laporan hasil audit yang terbit belum memenuhi target karena adanya refocusing anggaran akibat kondisi pandemic Covid-19 sehingga mengurangi jumlah obyek pemeriksaan ;
2. Sebab tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan belum memenuhi target karena terdapat temuan BPK yang membutuhkan waktu untuk dipenuhi dan banyak temuan terkait pihak ketiga (penyedia barang/jasa);
3. Sebab frekuensi koordinasi pengawasan yang dilaksanakan belum memenuhi target karena pelaksanaannya bergantung pada jumlah rapat koordinasi pengawasan baik tingkat pusat maupun Provinsi yang tidak tentu di setiap tahunnya;

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang disajikan dalam tabel berikut :

TABEL T-C.30

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Tujuan:											
	Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintahan desa melalui peran pengawasan internal yang efektif		Opini Pemeriksa Eksternal WTP terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Nilai AKIP Perangkat Daerah memuaskan		A	A	A	A	B	n/a	A	A	
	Sasaran:											
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Persentase penurunan temuan berulang kode 01, 02 dan 03		32	34	36	38		n/a	36	38	
		- BPK		32	34	36	38	38,24	n/a	36	38	
		- Inspektorat		32	34	36	38	3,28	n/a	36	38	

		Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat										
		- BPK		97,594	97,988	98,382	98,776	90,35	n/a	98,382	98,776	
		- Inspektorat		97,594	97,988	98,382	98,776	99,91	n/a	98,382	98,776	
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja memuaskan		42,85	64,3	85,7	100	28,57	n/a	85,7	100	
		Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan		100	100	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi		71	72	73	74	56,90	n/a	73	74	

	Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan		Tingkat kapabilitas APIP menurut IACM di level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Inspektorat Daerah sebagai bidang pengawasan daerah memiliki pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur **Peraturan Bupati No. 82 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan daerah.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian dan evaluasi atas target-target sasaran dalam RPJMD masih belum optimal;
2. Koordinasi dalam hal pengendalian dan bidang pengawasan di masing-masing Inspektur Pembantu (Irbn) masih belum optimal;
3. SDM pada Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih sangat terbatas;

Permasalahan dan hambatan dalam kegiatan pengawasan :

1. Lemahnya pengendalian intern pemerintah Kabupaten Sampang yang ditandai dengan temuan pada kategori kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada tahun 2020 yakni sebesar 14,18%, sehingga menyebabkan temuan ketidakpatuhan yang relative tinggi yakni 84,20%

Tujuan dari SPIP adalah guna memberikan keyakinan memadai bagi SKPD atas tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien, pengamanan aset negara, Ketaatan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Terkait dengan penyelenggaraan SPIP, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- a. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP

Output dari indikator ini adalah jumlah Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP yang disusun oleh SKPD berdasarkan hasil penyelenggaraan SPIP di wilayah masing-masing. Mulai pada tahun 2019, hanya 10 SKPD di wilayah Pemerintah Kabupaten Sampang dari 42 SKPD yang telah menyusun RTP sehingga diharapkan pada akhir tahun 2023 seluruh SKPD telah menyusun RTP.

b. Tingkat maturitas SPIP

Output dari indikator ini berasal dari penilaian yang dilakukan secara berjenjang oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang akan dilanjutkan dengan Quality Assesment oleh BPKP Pusat. Hasil penilaian yang dilakukan pada tahun 2020, level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sampang adalah sebesar 2,3 sebagai level 2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa target level 3 yang ditetapkan pada tahun 2021 telah dicapai.

Kendala utama dalam penyelenggaraan SPIP ini adalah :

1. Kondisi bahwa SPIP belum sepenuhnya dijadikan pedoman pengendalian risiko internal SKPD, sehingga dampak yang dihasilkan belum optimal;
2. Pada saat melakukan kegiatan pengawasan, APIP belum melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap auditi, sehingga proses penyusunan Program Kerja belum mengacu kepada hasil SPI yang disusun oleh auditi.
3. Temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar 84,20% yang berdampak kerugian daerah cukup material
4. Rata-rata pengelolaan aset belum tertib.

Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP yaitu:

1. Belum dilaksanakannya kegiatan pemberian jasa pemberian saran (advisory service) secara optimal, berupa konseling, bimbingan teknis, asistensi, dan focus group discussion karena keterbatasan anggaran dan SDM. Selama ini yang telah dilaksanakan baru kegiatan konseling saja;
2. APIP belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dan juga Teknologi Informasi, padahal di masa mendatang Teknologi Informasi memegang peranan penting dalam kegiatan pengawasan, sehingga seluruh APIP diharapkan untuk dapat mulai menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap penggunaan Teknologi Informasi;
3. APIP belum berperan aktif dalam memverifikasi dan menilai efektivitas metodologi dan proses Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh auditi, sehingga auditi belum memperoleh dampak yang optimal dari penyusunan dokumen Manajemen Risiko;
4. APIP belum sepenuhnya melakukan analisis dan evaluasi dengan mengidentifikasi informasi yang cukup andal, relevan dan berguna dalam mencapai tujuan penugasan yang diberikan.

Faktor – faktor Kunci Keberhasilan

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan Menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah secara ideal;

- 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- 3 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan;
- 4 Perkembangan teknologi dan informasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2021 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 dengan kebutuhan riil Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Sampang

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp, 0000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp, 0000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.05.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
6.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
6.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					
6.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan	Kab. Sampang	Dokumen RKA, DPA, RENJA,	100 %	32,798,340	Penyusunan dokumen perencanaan	Kab. Sampang	Dokumen RKA, DPA, RENJA,	100 %	32,798,340	

	perangkat daerah		RENSTRA, PKPT			perangkat daerah		RENSTRA , PKPT			
6.01.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sampang	Laporan triwulanan	4 laporan	4,764,966	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sampang	Laporan triwulanan	4 laporan	4,764,966	
6.01.01. 2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sampang	laporan lkpj, lkjip	2 dokume n	9.136.970	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sampang	laporan lkpj, lkjip	2 dokume n	9.136.970	
6.01.01. 2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					
6.01.01. 2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Sampang	Dokumen Gaji, Pajak, JKK, JK N, TPP dan Honorarium ASN	6 laporan	4.540.678.7 96	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Sampang	Dokumen Gaji, Pajak, JKK, JKN, TPP dan Honorariu m ASN	6 laporan	4.540.678.7 96	
6.01.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sampang	Jumlah Alat Tulis Kantor	70 Jenis	82.002.056	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sampang	Jumlah Alat Tulis Kantor	70 Jenis	82.002.056	
6.01.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kab. Sampang	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	4.592.566	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kab. Sampang	Laporan Keuangan Akhir	1 laporan	4.592.566	

	Akhir Tahun SKPD		(CaLK)			Akhir Tahun SKPD		Tahun (CaLK)			
6.01.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Sampang	Laporan Keuangan Semester	2 Laporan	4.548.408	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Sampang	Laporan Keuangan Semester	2 Laporan	4.548.408	
6.01.01. 2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>					<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>					
6.01.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sampang	Jumlah Auditor yang mengikuti diklat teknis substansi dan penjenjangan auditor	24 OK	243.974.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sampang	Jumlah Auditor yang mengikuti diklat teknis substansi dan penjenjangan auditor	24 OK	243.974.000	
6.01.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sampang	Jumlah Tenaga Pemeriksa yang mengikuti Bimtek, sosialisasi, workshop	30 OK	363.979.250	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sampang	Jumlah Tenaga Pemeriksa yang mengikuti Bimtek, sosialisasi, workshop	30 OK	363.979.250	

			dan PKS					dan PKS			
6.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
6.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sampang	Jumlah alat listrik	10 jenis	19.523.072	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sampang	Jumlah alat listrik	10 jenis	19.523.072	
6.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sampang	- Jumlah Alat dan Bahan Pembersih - Jumlah Kelengkapan Komputer - Jumlah spanduk	-30 jenis - 20 jenis - 5 jenis	27.263.123	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sampang	- Jumlah Alat dan Bahan Pembersih - Jumlah Kelengkap an Komputer - Jumlah spanduk	-30 jenis - 20 jenis - 5 jenis	27.263.123	
6.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kab. Sampang	jumlah cetak dan ganda	200 kali	45.465.580	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kab. Sampang	jumlah cetak dan ganda	200 kali	45.465.580	
6.01.01. 2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kab. Sampang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	10 jenis	5.520.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kab. Sampang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang	10 jenis	5.520.000	

								-undangan			
6.01.01. 2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Sampang	Jumlah Kunjungan Tamu	40 kali	168.410.00 0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Sampang	Jumlah Kunjungan Tamu	40 kali	168.410.00 0	
6.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Sampang	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD	40 kali	135.480.40 0	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Sampang	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD	40 kali	135.480.40 0	
6.01.01. 2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>					<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>					
6.01.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Sampang	Jumlah pengadaan kursi, lemari dan papan pengumuman	20 buah	49.475.328	Pengadaan Mebel	Kab. Sampang	Jumlah pengadaa n kursi, lemari dan papan pengumum an	20 buah	49.475.328	
6.01.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sampang	Jumlah Pengadaan AC,Proyektor ,Laptop dan Printerr	10 buah	132.628.44 1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sampang	Jumlah Pengadaa n AC,Proyek tor,Laptop	10 buah	132.628.44 1	

								dan Printerr			
6.01.01. 2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>					<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>					
6.01.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Kab. Sampang	Jumlah surat terkirim	2000 surat	14.022.950	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Kab. Sampang	Jumlah surat terkirim	2000 surat	14.022.950	
6.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sampang	-Jumlah Tagihan Air - Jumlah Tagihan Internet -Jumlah Tagihan Listrik - Jumlah Tagihan Telepon	- 12 bulan -12 bulan -12 bulan - 12 bulan	102.297.185	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sampang	-Jumlah Tagihan Air - Jumlah Tagihan Internet -Jumlah Tagihan Listrik - Jumlah Tagihan Telepon	- 12 bulan -12 bulan -12 bulan - 12 bulan	102.297.185	
6.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sampang	Pembayaran jasa Cleaning Service	12 bulan	60.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sampang	Pembayaran jasa Cleaning Service	12 bulan	60.000.000	
6.01.01. 2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik</i>					<i>Pemeliharaan Barang Milik</i>					

	<i>Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					<i>Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					
6.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sampang	jumlah pemeliharaan /rutin berkala kendaraan dinas/operasional pajak dan perizinan	- 5 unit - 26 unit	69.510.138	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sampang	jumlah pemeliharaan/rutin berkala kendaraan dinas/operasional pajak dan perizinan	- 5 unit - 26 unit	69.510.138	
6.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sampang	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor	1 paket	80.710.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sampang	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor	1 paket	80.710.000	
6.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sampang	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	1 paket	22.100.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sampang	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	1 paket	22.100.000	
6.01.01.	<i>Penataan</i>					<i>Penataan</i>					

2.13	<i>Organisasi</i>					<i>Organisasi</i>					
6.01.01. 2.13.02	Fasilitas Pelayan Publik dan Tata Laksana	Kab. Sampang	Jumlah promosi dan perangkat daerah	2 kali	28.475.000	Fasilitas Pelayan Publik dan Tata Laksana	Kab. Sampang	Jumlah promosi dan perangkat daerah	2 kali	28.475.000	
6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN					PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN					
6.01.02. 2.01	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>					<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>					
6.01.02. 2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Sampang	jumlah LHA kinerja yang terbit	6 LHA	303.233.985	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Sampang	jumlah LHA kinerja yang terbit	6 LHA	303.233.985	
6.01.02. 2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Sampang	audit Dak fisik jumlah LHA kas opname jumlah LHA operasional yang terbit jumlah LHM hibah/banso	- 6 LHA - 40 LHA - 20 LHA - 30 LHM	392.898.633	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Sampang	audit Dak fisik jumlah LHA kas opname jumlah LHA operasional yang terbit	- 6 LHA - 40 LHA - 20 LHA - 30 LHM	392.898.633	

			s BOS					jumlah LHM hibah/ban sos BOS			
6.01.02. 2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Sampang	jumlah LHR lapkin jumlah LHR renja jumlah LHR RKPD yang terbit jumlah LHR RPJMD dan renstra yang terbit	- 39 LHR - 39 LHR - 1 LHR - 2 LHR	96.628.020	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Sampang	jumlah LHR lapkin jumlah LHR renja jumlah LHR RKPD yang terbit jumlah LHR RPJMD dan renstra yang terbit	- 39 LHR - 39 LHR - 1 LHR - 2 LHR	96.628.020	
6.01.02. 2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Sampang	jumlah LHR Barjas jumlah LHR DPA perubahan jumlah LHR	- 1 LHR - 1 LHR - 1 LHR - 3 LHR - 1 LHR	169.906.97 0	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Sampang	jumlah LHR Barjas jumlah LHR DPA perubahan	- 1 LHR - 1 LHR - 1 LHR - 3 LHR - 1 LHR	169.906.97 0	

			LKPD yang terbit Jumlah LHR realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik jumlah LHR RKA					n jumlah LHR LKPD yang terbit Jumlah LHR realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik jumlah LHR RKA			
6.01.02. 2.01.05	Pengawasan Desa	Kab. Sampang	LHM Desa LHP Dana Desa LHP Dana kelurahan	- 100 LHM - 42 LHP - 6 LHP	399.957.680	Pengawasan Desa	Kab. Sampang	LHM Desa LHP Dana Desa LHP Dana kelurahan	- 100 LHM - 42 LHP - 6 LHP	399.957.680	
6.01.02. 2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Sampang	jumlah join audit jumlah	- 8 Kali - 5 Kali	200.000.0000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Sampang	jumlah join audit jumlah	- 8 Kali - 5 Kali	200.000.0000	

			koordinasi pengawasan antar APIP					koordinasi pengawasan antar APIP			
6.01.02. 2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Sampang	persentase kerugian hasil pemeriksaan eksternal (BPK) dan internal (Inspektorat) yang dikembalikan ke kasda persentase temuan administrasi yang ditindaklanjuti	- 97% - 98%	248.849.795	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Sampang	persentase kerugian hasil pemeriksaan eksternal (BPK) dan internal (Inspektorat) yang dikembalikan ke kasda persentase temuan administrasi yang ditindaklanjuti	- 97% - 98%	248.849.795	
6.01.02. 2.02	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>					<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>					

6.01.02. 2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Kab. Sampang	jumlah LHA investigasi/P KKN/Khusus yang terbit	25 LHA	400.000.00 0	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Kab. Sampang	jumlah LHA investigasi/ PKKN/Khu sus yang terbit	25 LHA	400.000.00 0	
6.01.02. 2.02.02	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Kab. Sampang	Jumlah LHA kasus kepegawaia n jumlah LHA PDTT/Duma s jumlah LHA penanganan covid 19 jumlah LHR anggaran covid 19 jumlah LHR probity audit	- 50 LHA - 15 LHA - 6 LHA - 6 LHR - 6 LHR	450.000.00 0	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Kab. Sampang	Jumlah LHA kasus kepegawa ian jumlah LHA PDTT/Du mas jumlah LHA penangan an covid 19 jumlah LHR anggaran covid 19 jumlah LHR probity	- 50 LHA - 15 LHA - 6 LHA - 6 LHR - 6 LHR	450.000.00 0	

								audit			
6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
<i>6.01.03.2.01</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>					<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>					
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Sampang	-jumlah pengembangan aplikasi sistem manajemen pengawasan -jumlah POS pengawasan yang disusun	- 1 APK - 2 POS	33.092.798	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Sampang	-jumlah pengembangan aplikasi sistem manajemen pengawasan -jumlah POS pengawasan yang disusun	- 1 APK - 2 POS	33.092.798	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis	Kab. Sampang	-reviu berjenjang	-4 lapora	151.043.804	Perumusan Kebijakan Teknis	Kab. Sampang	-reviu berjenjan	-4 laporan	151.043.804	

	di Bidang Fasilitas Pengawasan		dan telaahan sejawat - skor kapabilitas APIP level 3	n - 3 level		di Bidang Fasilitas Pengawasan		g dan telaahan sejawat - skor kapabilitas APIP level 3	- 3 level		
6.01.03.2.02	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>					<i>Pendampingan dan Asistensi</i>					
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sampang	jumlah asistensi/pendampingan SPIP jumlah LHE LPPD yang terbit jumlah LHE Sakip yang terbit	- 2 kali - 1 LHE - 39 LHE	86.528.889	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sampang	jumlah asistensi/pendampingan SPIP jumlah LHE LPPD yang terbit jumlah LHE Sakip yang terbit	- 2 kali - 1 LHE - 39 LHE	86.528.889	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan dan Asistensi Verifikasi, dan Penilaian	Kab. Sampang	jumlah asistensi/pendampingan	- 2kali - 39 SKPD - 75	61.643.216	Pendampingan dan Asistensi Verifikasi, dan Penilaian	Kab. Sampang	jumlah asistensi/pendampiran	- 2kali - 39 SKPD - 75	61.643.216	

	Reformasi Birokrasi		jumlah verifikasi nilai RB	nilai		Reformasi Birokrasi		ngan jumlah verifikasi nilai RB	nilai		
6.01.03. 2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Sampang	laporan monev mcp laporan sosialisasi pencegahan korupsi laporan UPG laporan whistle blower system PD dengan wilayah WBK dan ZI	- 4 laporan - 4 laporan - 4 laporan - 4 laporan - 2 PD	431.022.973	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Sampang	laporan monev mcp laporan sosialisasi pencegahan korupsi laporan UPG laporan whistle blower system PD dengan wilayah WB dan ZI	- 4 laporan - 4 laporan - 4 laporan - 4 laporan - 2 PD	431.022.973	
6.01.03. 2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Sampang	Nilai Integritas	72 nilai	138.255.520	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Sampang	Nilai Integritas	72 nilai	138.255.520	
	TOTAL				9,810,418,852	TOTAL				9,810,418,852	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

a.)Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menelaah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 dan berdasarkan RKPD Kabupaten Sampang tahun 2022 maka diperoleh tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Prioritas Pembangunan dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sampang

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Prioritas 1	Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	-	7,35
		Indeks Risiko Bencana	-	142,78
Prioritas 2	Pemantapan Pemulihan Ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah	Pertumbuhan ekonomi	%	3,50
		Indeks Gini	-	0,261
Prioritas 3	Peningkatan Ketahanan Sosial Masyarakat Melalui Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Pendidikan dan Kesehatan Serta Sarana dan Prasarana Dasar	Indeks Pembangunan Manusia	-	65,38
		Angka Kemiskinan	%	20,85
Prioritas 4	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan inovasi daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	-	62,01
Prioritas 5	Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat	Indeks Toleransi	-	3,77

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022

Berdasar tabel diatas yang memuat lima prioritas pembangunan dengan delapan indikator kinerja utama, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mendukung pencapaian sasaran pembangunan pada **Prioritas Pembangunan Daerah Keempat** RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu : **“Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan inovasi daerah”** dengan target pada Tahun 2022 adalah 62,01.

b.) Target indikator Kinerja Pemerintah Daerah (IKD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2021

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan menunjukkan indikator keberhasilan pembangunan dilihat dari sisi urusan baik wajib maupun pilihan. Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dari tiga aspek utama yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah

Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, aspek utama dalam kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan termasuk dalam Aspek Pelayanan Umum yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (IKD) berdasarkan PMDN No. 17 Tahun 2021	Satuan	Target RKPD Tahun 2022	Target Nasional Tahun 2022
1	2	3	4	5
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
1	Tingkat Kapabilitas APIP Menurut IACM	Level	3	
2	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah sampai tingkat terdefinisi	%	35,90	

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah yang telah dituangkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah pada Tahun 2022 sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020
1	2	3	4
	Tujuan:		
1	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan	1 Opini Pemeriksa Eksternal WTP terhadap LKPD	WTP

	pemerintah daerah melalui peran pengawasan internal yang efektif	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah memuaskan	A
2	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten	1	Tingkat Kapabilitas APIP menurut IACM	Menuju level 4
	Sasaran:			
1	Meningkatkan akuntabilitas keuangan	1	Persentase penurunan temuan berulang kode 01, 02 dan 03 -BPK -Inspektorat	36 36
		2	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	98,382
2	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja memuaskan	85,7 (36 PD)
		2	Persentase penanganan kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100
3	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	1	Nilai Reformasi Birokrasi	72
4	Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengawasan	1	Tingkat Kapabilitas APIP menurut IACM di level 3	Level 3

3.3 Program dan Kegiatan

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022

Dalam merumuskan program kegiatan Inspektorat Daerah mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Inspektorat Daerah mendukung pada pencapaian misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**.

Adapun program-program yang mendukung pada sasaran tersebut adalah Program Perencanaan Pembangunan daerah, Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah, Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan, Program Pengembangan Data, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan dan Program Penelitian dan Pengembangan.

c.) Rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD

Bahwa program/ kegiatan dan pagu indikatif pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang sesuai dengan perumusan awal RKPD

d.) Tabel rencana Program dan Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang

Pada tahun 2022 telah dirumuskan perencanaan Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Sampang

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
6	01	01	2.01		<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>								
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen RKA, DPA, RENJA, RENSTRA, PKPT	Kab. Sampang	100%	32.798.340	PAD		100%	34.438.257
6	01	01	2.01	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan triwulanan	Kab. Sampang	100%	4.764.966	PAD		100%	5.003.214
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LKPJ, LKJJIP	Kab. Sampang	100%	9.136.970	PAD		100%	9.593.819
6	01	01	2.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>								
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Gaji, Pajak, JKK,	Kab. Sampang	100%	4.540.678.796	PAD		100%	4.767.712.736

						JKN, TPP, dan Honorarium ASN							
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK	Kab. Sampang	100%	82.002.056	PAD		100%	86.102.159
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun (CaLK)	Kab. Sampang	100%	4.592.566	PAD		100%	4.822.194
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan keuangan semesteran	Kab. Sampang	100%	4.548.408	PAD		100%	4.775.828
6	01	01	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>								
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Auditor yang mengikuti diklat teknis substansi dan penjurangan auditor	Kab. Sampang	100%	243.974.000	PAD		100%	256.172.700
6	01	01	2.05	11	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Tenaga Pemeriksa yang mengikuti Bimtek, sosialisasi, workshop dan PKS	Kab. Sampang	100%	363.979.250	PAD		100%	382.178.213
6	01	01	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>								
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	jumlah alat listrik	Kab. Sampang	100%	19.523.072	PAD		100%	20.499.226

					Bangunan Kantor								
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Pembersih Jumlah Kelengkapan Komputer jumlah spanduk	Kab. Sampang	100%	27.263.123	PAD		100%	28.626.279
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah cetak dan ganda	Kab. Sampang	100%	45.465.580	PAD		100%	47.738.859
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sampang	100%	5.520.000	PAD		100%	5.796.000
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan tamu	Kab. Sampang	100%	168.410.000	PAD		100%	176.830.500
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kunsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Kunsultasi SKPD	Kab. Sampang	100%	135.480.400	PAD		100%	142.254.420
6	01	01	2.07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>								
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Kursi, Lemari dan Papan Pengumuman	Kab. Sampang	100%	49.475.328	PAD		100%	51.949.094
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan	Jumlah	Kab.	100%	132.628.441	PAD		100%	139.259.863

					Mesin Lainnya	Pengadaan AC, Proyektor, Laptop dan Printer	Sampang						
6	01	01	2.08		<i>Penunjang Jasa Urusan Pemerintahan Daerah</i>								
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	Kab. Sampang	100%	14.022.950	PAD		100%	14.724.098
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan air jumlah tagihan internet jumlah tagihan listrik jumlah tagihan telepon	Kab. Sampang	100%	102.297.185	PAD		100%	107.412.044
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran jasa cleaning service	Kab. Sampang	100%	60.000.000	PAD		100%	63.000.000
6	01	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>								
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan/ rutin berkala kendaraan dinas/operasional pajak dan perizinan	Kab. Sampang	100%	69.510.138	PAD		100%	72.985.645
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	jumlah pemeliharaan/	Kab. Sampang	100%	80.710.000	PAD		100%	84.745.500

					Bangunan Lainnya	rehabilitasi gedung kantor							
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	Kab. Sampang	100%	22.100.000	PAD		100%	23.205.000
6	01	01	2.13		<i>Penataan Organisasi</i>								
6	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan tata laksana	Jumlah promosi perangkat daerah	Kab. Sampang	100%	28.475.000	PAD		100%	29.898.750
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								
6	01	02	2.01		<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>								
6	01	02	2.01	01	Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	jumlah LHA kinerja yang terbit	Kab. Sampang	100%	303.233.985	PAD		100%	318.395.684
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	audit Dak fisik jumlah LHA kas opname jumlah LHA operasional yang terbit jumlah LHM hibah/bansos BOS	Kab. Sampang	100%	392.898.633	PAD		100%	412.543.565
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan kinerja	jumlah LHR	Kab. Sampang	100%	96.628.020	PAD		100%	101.459.421

						lapkin jumlah LHR renja jumlah LHR RKPD yang terbit jumlah LHR RPJMD dan renstra yang terbit							
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHR Barjas jumlah LHR DPA perubahan jumlah LHR LKPD yang terbit Jumlah LHR realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik jumlah LHR RKA	Kab. Sampang	100%	169.906.970	PAD		100%	178.402.319
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	LHM Desa LHP Dana Desa LHP Dana	Kab. Sampang	100%	399.957.680	PAD		100%	419.955.564

						kepegawaian jumlah LHA PDTT/Dumas jumlah LHA penanganan covid 19 jumlah LHR anggaran covid 19 jumlah LHR probity audit							
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
6	01	03	2.01		<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>								
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	jumlah pengembang an aplikasi sistem manajemen pengawasan jumlah POS pengawasan yang disusun	Kab. Sampang	100%	33.092.798	PAD		100%	34.747.438
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	reviu berjenjang dan telaahan sejawat	Kab. Sampang	100%	151.043.804	PAD		100%	158.595.994

						skor kapabilitas APIP level 3							
6	01	03	2.02		<i>Pendampingan dan Asistensi</i>								
6	01	03	2.02	01	Pendampingan Asistensi urusan pemerintah daerah	jumlah asistensi/pend ampingan SPIP jumlah LHE LPPD yang terbit jumlah LHE Sakip yang terbit	Kab. Sampang	100%	86.528.889	PAD		100%	90.855.333
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	jumlah asistensi/pend ampingan jumlah verifikasi nilai RB	Kab. Sampang	100%	61.643.216	PAD		100%	64.725.377
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	laporan monev mcp laporan sosialisasi pencegahan korupsi laporan UPG laporan whistle blower system	Kab. Sampang	100%	431.022.973	PAD		100%	452.574.122

						PD dengan wilayah WBK dan ZI							
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	nilai integritas	Kab. Sampang	100%	138.255.520	PAD		100%	145.168.296

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Sampang yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Sampang adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 terdapat 3 program dan 12 kegiatan dan 39 sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indicator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sampang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Adapun rencana kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten sampang dapat dijelaskan pada table Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang sebagai berikut ini:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Tahun 2022
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Alokasi Dana	
					Hasil Program		Kegiatan			Pagu Indikatif 2022	Pagu Maju 2023
							Keluaran		Hasil		
4.05.	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA										
6.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Sasaran 01			100					
6.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

6.01.01.2 .01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah			Kab. Sampang			Dokumen RKA, DPA, RENJA, RENSTRA, PKPT	7 Dokumen		100 %	32.798.340	34.438.257
6.01.01.2 .01.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Sampang	-		Laporan Triwulanan	4 Laporan		100 %	4.764.966	5.003.214
6.01.01.2 .01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Sampang			Laporan LKPJ, LKJIP	2 dokumen		100 %	9.136.970	9.593.819
6.01.01.2 .02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>											
6.01.01. 2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN			Kab. Sampang			Dokumen Gaji, Pajak, JKK, JKN, TPP dan Honorarium ASN	6 laporan		100 %	4.540.678.796	4.767.712.736

6.01.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kab. Sampan g			Jumlah Alat Tulis Kantor	70 Jenis		100 %	82.002.05 6	86.102.1 59
6.01.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Sampan g			Laporan Keuangan Akhir Tahun (CaLK)	1 Dokume n		100 %	4.592.56 6	4.822.19 4
6.01.01.2 .02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD			Kab. Sampan g			Laporan Keuangan Semester	2 Laporan		100 %	4.548.408	4.775.828
6.01.01.2 .05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>											
6.01.01.2 .05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kab. Sampan g			Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti diklat	24 OK		100 %	243.974.0 00	256.172.7 00

						teknis substansi dan penjenjangan auditor					
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Sampang		Jumlah APIP yang mengikuti Bimtek	30 OK		100 %	363.979.250	382.178.213
6.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>										
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sampang		Jumlah alat listrik	10 jenis		100 %	19.523.072	20.499.226
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Sampang		- Jumlah Alat dan Bahan Pembersih - Jumlah Kelengkapan Komputer	-30 jenis - 20 jenis		100 %	27.263.123	28.626.279

							- Jumlah spanduk	- 5 jenis				
6.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan			Kab. Sampang			- Jumlah cetak dan ganda	200 kali		100 %	45.465.580	47.738.859
6.01.01. 2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kab. Sampang			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 jenis		100 %	5.520.000	5.796.000
6.01.01. 2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Sampang			Jumlah Kunjungan Tamu	40 kali		100 %	168.410.000	176.830.500
6.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			Kab. Sampang			Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD	40 kali		100 %	135.480.400	142.254.420
6.01.01.2 .07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>											

	<i>Pemerintah Daerah</i>											
6.01.01.2 .07.05	Pengadaan Mebel			Kab. Sampang			Jumlah pengadaan kursi, lemari dan papan pengumuman	3 jenis		100 %	49.475.328	51.949.094
6.01.01.2 .07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sampang			Jumlah pengadaan penghancur kertas, AC, Proyektor, Laptop dan Printer	6 jenis		100 %	132.628.441	139.259.863
6.01.01.2 .08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>											
6.01.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat			Kab. Sampang			Jumlah surat terkirim	2500 surat		100 %	14.022.950	14.724.098

6.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sampan g			-Jumlah Tagihan Air - Jumlah Tagihan Internet -Jumlah Tagihan Listrik - Jumlah Tagihan Telepon	- 12 bulan -12 bulan -12 bulan - 12 bulan		100 %	102.297.1 85	107.412.0 44
6.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sampan g			Pembayar an jasa Cleaning Service	12 bulan		100 %	60.000.00 0	63.000.00 0
6.01.01.2 .09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>											
6.01.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan			Kab. Sampan g			Jumlah pemelihar aan/ rutin berkala kendaraan dinas/ operasion	1 paket		100 %	69.510.13 8	72.985.64 5

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						al					
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Sampang			Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	1 paket		100 %	80.710.000	84.745.500
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Sampang			Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	59 kali		100 %	22.100.000	23.205.000
6.01.01.2.13	<i>Penataan Organisasi</i>											
6.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Kab. Sampang			Jumlah promosi dan perangkat daerah	2 kali		100 %	28.475.000	29.898.750

6.01.02.	Program Penyelenggaraan Pengawasan						- Nilai IKM					
6.01.02.2 .01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal											
6.01.02.2 .01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Kab. Sampang			- LHA Kinerja - LHM BOS - Monev Fisik	-12 LHP -28 LHM -3 LHM		100 %	303.233.985	318.395.684
6.01.02.2 .01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Kab. Sampang			- LHA aspek keuangan tertentu - LHA operasional OPD	- 6 LHP - 15 LHP		100 %	392.898.633	412.543.565
6.01.02.2 .01.03	Reviu Laporan Kinerja			Kab. Sampang			LJHR yang terbit	5 LHR		100 %	96.628.020	101.459.421
6.01.02.2 .01.04	Reviu Laporan Keuangan			Kab. Sampang			LHR yang terbit	7 LHR		100 %	169.906.970	178.402.319

6.01.02.2 .01.05	Pengawasan Desa			Kab. Sampan g			- LHA operasion al keuangan DD/ADD - LHM DD/ADD - LHM kelurahan	- 42 LHA - 72 LHM - 3 LHM		100 %	399.957. 680	419.955. 564
6.01.02.2 .01.07	Kerjasama Pengawasan Internal			Jawa Timur			Jumlah join audit	8 kali			200.000.0 000	210.000.0 00
				Jawa Timur			Jumlah koordinasi pengawas an antar APIP	5 kali				
6.01.02.2 .01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP			Kab. Sampan g			Jumlah temuan pengawas an BPK RI dan APIP yang telah ditindaklan juti	95%		100 %	248.849. 795	261.292. 285

6.01.02.2 .02	Penyelenggara an Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah			Kab Sampan g			Jumlah LHA investigasi /PKKN/khu sus yang terbit	25 LHA			400.000.0 00	420.000.0 00
							- Audit investigasi / PKKN - Audit PDTT/ khusus - Audit penangan an COVID 19 - Kasus kepegawai an - LHP dumas	- 10 LHP - 25 LHP - 6 LHP - 35 LHP - 15 LHP		100 %	450.000. 000	472.500.0 00
6.01.02. 2.02.02	Pengawasan dengan tujuan tertentu			Kab. Sampan g								
6.01.03.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampinga n dan											

	Asistensi											
6.01.03.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan											
6.01.03. 2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			Kab. Sampan g			- Jumlah pedoman/ juklak/ SOP Pengawa san - Sistem manajem en pengawa san berfungsi baik	- 2 dokume n - 1 apk		100 %	33.092.79 8	34.747.43 8
6.01.03. 2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			Kab. Sampan g			- Level kapabilita s APIP - Reviu berjenjan g	- 3 level - 4 laporan -- 4 laporan		100 %	151.043.8 04	158.595.9 94

							- Telaahan sejawat					
6.01.03.2 .02	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>											
6.01.03. 2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Kab. Sampang			Jumlah asistensi/ pendampingan SPIP	2 kali		100 %	86.528.889	90.855.333
6.01.03. 2.02.02	Pendampingan dan Asistensi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Kab. Sampang			- Jumlah asistensi/ pendampingan RB - Nilai RB	- 2kali - 71 nilai		100 %	61.643.216	64.725.377
6.01.03. 2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Kab. Sampang			- Laporan MCP - Laporan UPG - Laporan WBK dan ZI - Laporan Wistle blower	- 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan		100 %	431.022.973	452.574.122

							system					
6.01.03. 2.02.04	Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Kab. Sampang			Nilai Integritas	72 nilai		100 %	138.255.5 20	145.168.9 6
JUMLAH PAGU										9.810.418.852	10.300.93 9.795	

Dalam Renja ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang merencanakan 3 Program dan 12 Kegiatan dengan jumlah total pagu indikatif sebesar Rp. 9.810.418.852,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). Lokasi kegiatan terpusat di Wilayah Kabupaten Sampang kecuali untuk kegiatan Rapat Koordinasi dan Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan diluar daerah. Dari total dana pagu indikatif sebesar Rp. 9.810.418.852,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) tersebut seluruhnya dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022.

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah merupakan terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis, inovasi daerah ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta untuk mempercepat pencapaian target kinerja pembangunan. Selanjutnya inovasi yang digagas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang yang akan dilaksanakan dan dikembangkan pada Tahun 2022 dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja dan/ atau untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang diampu adalah sebagai berikut :

No	Nama Inovasi	Deskripsi
1	Klinik Konsultasi Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat (KLINIK KOPDUMAS)	<p>Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Pengawasan pada hakekatnya adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.</p>

		<p>Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.</p>
		<p>Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengendalikan munculnya permasalahan dalam penyelenggaraan segala urusan pemerintahan dalam suatu instansi/pemerintah daerah. Sehingga menjadikan Inspektorat berperan strategis agar jangan sampai permasalahan muncul kemudian dan menjadi temuan oleh Aparat Pengawas Eksternal seperti BPKP dan BPK.</p>
2	SIP (Sistem Informasi Pengawasan)	<p>Dalam mendukung pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang haruslah saling bersinergi satu dengan lainnya. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan teknologi yang kian pesat dan guna membantu penyajian dan pemberian data yang reliability kepada auditor, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang berupaya membangun dan meningkatkan kinerja melalui pembangunan Sistem Informasi Pengawasan (SIP) mulai dari tahap persiapan pelaksanaan audit sampai dengan pelaporan hasil audit. Sistem informasi tersebut merupakan sub unsur dari SPI dan merupakan Komitmen Inspektur Daerah untuk merespon penyediaan sarana dan prasarana berupa Teknologi Informasi guna menunjang kegiatan pengendalian,</p>

BAB V PENUTUP

Renja Tahun 2022 adalah Renja tahun keempat pelaksanaan program / kegiatan Inspektorat Daerah dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2019 – 2024. Renja tahun 2022 tahun kedua Renstra Inspektorat Daerah disusun dengan memperhatikan target program / kegiatan yang pada tahun – tahun sebelumnya yang belum tercapai dengan tidak meninggalkan program / kegiatan yang menjadi isu strategis Inspektorat Daerah. Namun demikian keterbatasan pagu anggaran menjadi unsur pembatas untuk dapat benar-benar merencanakan program / kegiatan berdasarkan skala prioritas.

Prosedur standar penyusunan renja mengacu kepada sasaran dalam renstra yang telah ditetapkan dengan target program / kegiatan yang telah direncanakan dalam kurun waktu lima tahun. Dengan demikian penetapan rencana kinerja tahunan berangkat dari hasil evaluasi pelaksanaan program / kegiatan dikorelasikan dengan renstra dan pelaksanaan program / kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Oleh karena itu permasalahan, tantangan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program / kegiatan menjadi kajian untuk selanjutnya direncanakan upaya tindak lanjut dalam renstra atau renja tahun berikutnya. Rencana tindak lanjut dari Renja Tahun 2022 secara garis besar meliputi:

- 1) Program / kegiatan yang menjadi isu strategis
- 2) Program / kegiatan yang belum tercapai pada tahun sebelumnya

Kata kunci dalam setiap perencanaan adalah mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan, mengakomodir isu strategis serta menjadikan setiap perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan program / kegiatan.

Sampang, 09 Agustus 2021
Pit. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG



ARIWIBOWO SULISTYO, S.Sos.,M.Si

Pembina
NIP. 19751012 199901 1 002